

## INDUSTRI &amp; PERDAGANGAN

# Transformasi Digital UMKM Bantu Jaga Stabilitas Harga

NERACA

Jakarta - Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal ini ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2020. "Inflasi tahun 2020 harus dipertahankan agar tidak terlalu rendah dan dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap memproduksi," ujar Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Presiden Jokowi, kebijakan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya fokus terhadap upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan kepada daya beli masyarakat dan para produsen, khususnya pelaku UMKM di sektor pangan.

"Pemerintah Daerah (Pemda) pun diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terutama, belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya sektor UMKM. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda diutamakan untuk menyerap produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM," ungkap Presiden Jokowi.

Dalam hal ketersediaan pangan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sangat penting untuk memastikan data benar-be-

nar valid agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat.

"Segera perkuat data informasi pangan, baik di pusat dengan PIHPS, maupun di daerah dengan data dan informasi yang penting lainnya.

Sinergikan dengan data-data di daerah. Buat neraca pangan yang akurat agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa diatasi dengan cepat," imbu Presiden Jokowi.

Disisi lain, Presiden Jokowi juga meminta para gubernur, walikota, dan bupati untuk terus memberikan tone yang positif dan optimis kepada masyarakat.

Selain itu, harus dapat menyampaikan langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi covid-19 setiap saat dan menjelaskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

"Ajak masyarakat untuk saling membantu, saling mengingatkan, dan bergotong royong di masa sulit ini. Bangun harapan bahwa dengan bersatu kita akan bisa melalui semua ini," ujar Presiden Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi di 2019, serta tantangan pengendalian inflasi ke depan, utamanya di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19.

"Sebelumnya, kita telah berhasil menjaga level inflasi selama lima tahun terakhir pada kisaran 3,0% dan terjaga dalam sasaran nasional dengan laju inflasi pada 2019 sebesar 2,72% (year on year/yoj), lebih rendah daripada 2018 sebesar 3,13% (yoj). Namun, realisasi inflasi pada

September 2020 masih menunjukkan perlambatan 1,42% (yoj), sejalan dengan permintaan domestik yang masih lemah di tengah pandemi covid-19," ujar Airlangga.

Inflasi yang rendah ini dipengaruhi turunnya inflasi inti, akibat permintaan domestik yang masih lemah. Inflasi komponen volatile food yang masih rendah dipengaruhi berjalannya penurunan harga bahan pangan seiring pasokan yang terjaga dan minimnya gangguan distribusi.

"Sementara, komponen administred prices melambat, terutama didorong berjalannya penurunan tarif angkutan udara dan kebijakan energi yang akomodatif," jelas Airlangga.

Airlangga pun menyampaikan bahwa refo-cusing kebijakan TPIP dan TPID pada tahun ini tidak hanya mengupayakan agar realisasi inflasi 2020 tetap pada kisaran sasaran, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Kegiatan TPIP dan TPID tersebut diarahkan pada perbaikan daya beli masyarakat, memastikan produktivitas pangan tetap terjaga, meningkatkan penyerapan produk pangan, dan menjaga kelancaran distribusi produk pangan.

"Kami juga sangat mengharapkan inovasi dan terobosan para Kepala Daerah agar APBD terealisasi lebih cepat, sehingga dapat menahan kontraksi lebih dalam pada kuartal 4-2020 mendatang," Airlangga. Untuk itu, menurut Airlangga, TPIP dan TPID perlu mengembangkan berbagai kegiatan dan inovasi pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif. @iwan/gro



PERMASARAN PRODUK TEH UNTUK PASAR DOMESTIK : Petani menggunakan mesin petik saat menyortir daun teh di perkebunan PTPN VIII Dayehmanggung, Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (23/10/2020). PTPN VIII Jawa Barat - Banten dan PTPN IV Sumatera Utara yang memiliki kontribusi hampir 50 persen dari total produksi teh di Indonesia akan menargetkan pemasaran produk teh ke pasar domestik guna mengoptimalkan peluang di pasar modern maupun tradisional.

## Koperasi Menjadi Garda Terdepan Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta - Di tengah pandemi Covid-19, peranan koperasi sangat penting guna membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terutama, guna menyalurkan program bantuan atau kredit untuk permodalan mereka.

### NERACA

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira Adhinegara, menegaskan bahwa, koperasi sangat penting guna menggalakan ekonomi nasional, karena koperasi bisa menjangkau UMKM yang kini berkisar sekitar 64 juta pelaku UMKMB.

Bahkan, di tengah pandemi harusnya koperasi menjadi garda terdepan pemulihan ekonomi nasional, lewat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mengingat saat ini, koperasi yang punya database terkait dengan pelaku langsung UMKM.

"Pihak perbankan saja biasanya ambil data dari koperasi. Jadi, memang saat ini pemerintah harus mengembalikan peran koperasi, agar ekonomi kerakyatan kembali bergairah," jelas Bima.

Ditambah lagi, kata Bima, sektor perbankan saat ini sangat minim dalam menyalurkan bantuan kredit, terutama untuk pelaku UM-

KM karena resiko yang sangat tinggi adanya kekhawatiran kredit macet.

Di samping itu juga, pelaku UMKM sangat sulit untuk bisa mendapatkan permodalan dari perbankan. Mengingat, jika lewat perbankan harus ada jaminan.

"Sementara untuk kredit pelaku mikro biasanya mereka tidak punya jaminan. Makanya, mereka sulit dalam mendapatkan pinjaman dari perbankan," ulas Bima.

Lebih dari itu, menurut Bima, berbeda dengan koperasi, yang notabene tidak ada jaminan selama dia aktif menjadi anggota koperasi penyaluran pinjaman atau kredit lebih dimudahkan.

"Sehingga, usaha mikro dan kecil bisa terus jalan. Itulah kelebihan dari koperasi," jelas Bima.

Meski di era digital pun, Bima menjelaskan, peran koperasi pun tetap dibutuhkan. Pelaku usaha terutama usaha mikro dan kecil boleh saja memanfaatkan teknologi guna pemasaran dan edukasi.

"Tapi, kalau bicara per-

modalan, koperasi bisa lebih efektif karena minimnya persyaratan dan koperasi bisa menjangkau dan mengetahui persis seluk beluk usaha dari seluruh anggotanya," jelas Bima.

Bima pun menegaskan, di era digital seperti saat ini, koperasi tetap harus ada, karena belum semua pelaku usaha UMKM bisa menjangkau semua lewat platform digital. Terutama, untuk permodalan usahanya.

Oleh karena itu, Bima berharap, pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) harus memperbesar peran koperasi agar koperasi bisa menjadi pilihan utama dan andalan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka.

"Guna memulihkan ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan, pemerintah harus memberi peranan lebih terhadap koperasi," ungkap Bima.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Aku-mandiri) Hermawati Setyorini mengatakan, dengan berkoperasi ada keuntungan lebih yang bisa didapat.

Yaitu, bunga lebih rendah dan tidak ada jaminan. Sehingga, tidak memberatkan para pelaku usaha dalam mendapatkan pinjaman usaha, terutama untuk para pelaku usaha mikro.

"Usaha skala mikro san-

gat sedikit sekali yang punya jaminan, dan juga kepastian penghasilan. Jika dibebani bunga yang besar mereka akan kesulitan. Tapi dengan koperasi bunga bisa jauh lebih rendah yang berkisar 0,5 persen dari omset sehingga tidak membebani para pelaku usaha dalam mengembalikan pinjamannya," papar Hermawati.

Selain itu, lanjut Hermawati, kelebihan dari koperasi adalah ditangani langsung pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.

"Tidak ada campur tangan dari yang lain. Dan itu akan memudahkan peminatan dari pusat. Koperasi kan langsung dari Kementerian, jadi monitoringnya lebih terkontrol," ujar Hermawati.

Apalagi, menurut Hermawati, selama pandemi ini, UMKM sedang jadi Anak Emas, baik Kementerian, BUMN, maupun swasta, banyak yang menggulirkan program bantuan. Hanya saja jika program itu tidak ditangani secara benar, bisa salah sasaran.

"Jika peranan koperasi kembali digaungkan, bisa saja penyaluran dana atau program dari pemerintah bisa lebih cepat tersalurkan," jelas Hermawati.

Bagi Hermawati, masih adanya keengganan masyarakat untuk bikin atau ikut

koperasi, karena ketidaktahuan mereka. Mulai dari bikin akta, keanggotaannya, belum lagi masalah birokrasi yang berbelit-belit menjadikan orang tidak lagi ikut atau buat koperasi.

"Kalau memang pemerintah ingin kembali memberikan peranan lebih dari koperasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan koperasi lebih digencarkan lagi. Sehingga, masyarakat bisa lebih tertarik kembali berkoperasi," terang Hermawati.

### Tepat Sasaran

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kader-Sosia Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menambahkan, jika ada program pemerintah, perbankan hanya memakai data lama. Sementara jika melibatkan koperasi, bisa menyentuh langsung dengan masyarakat bawah, terutama para pelaku usaha yang terkena dampak pandemi.

"Karena data koperasi biasanya memang melihat dari keanggotaannya," imbuh Suroto.

Menurut Suroto, jika koperasi berjalan baik, bisa menghidupi orang banyak.

Karena, semua anggota koperasi biasanya mereka yang memang langsung bergerak di sektor usaha mikro. @iwan/gro



PENAMBAHAN KUOTA BANTUAN LANGSUNG TUNAI PRESIDEN : Perajin menunjukkan sepatu buatananya di kawasan Setiabudi, Jakarta, Jumat (23/10/2020). Presiden Joko Widodo menambah kuota Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak tiga juta penerima bagi pelaku usaha mikro, yang awalnya hanya 12 juta menjadi 15 juta penerima bantuan.

## Lindungi Konsumen Dari Transaksi Digital

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono mengungkapkan, niaga elektronik (niagelel) saat ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus dalam melakukan perlindungan konsumen.

Atas dasar itulah Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar bimbingan teknis (bimtek) sumber daya manusia (SDM) penegak pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS PK). Tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai langkah dan tindakan sebagai PPNS PK dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan di bidang perdagangan.

"Melalui bimtek PPNS PK ini diharapkan peserta dapat melaksanakan tugas dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang perlindungan konsumen sesuai kewenangan

dimiliki," ucap Veri.

Veri menyampaikan, niaga-el maupun transaksi keuangan digital saat ini menjadi pilihan yang aman dalam mengurangi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Selain transparansi data penjual dan pembeli, data barang dan jasa yang diperjualbelikan, serta keamanan transaksi, dukungan pemerintah terhadap perlindungan konsumen juga diperlukan.

Menurut Veri, hal ini untuk menjaga kemandirian pengiriman barang, proses pembelian barang, dan menjaga layanan purnajual tetap berjalan selayaknya transaksi konvensional. Perlindungan konsumen digital tertuang secara tersirat dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"PPNS PK diberikan kewenangan sebagai penyidik sesuai undang-undang yang dikawalnya. Untuk itu, pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat atau konsumen melalui pengawasan barang beredar dan/atau jasa sebagai upaya pencegahan, selain

regulasi yang mendukung terhadap konsumen," jelas Veri.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ojak Simon Manurung menyampaikan, kegiatan bimtek dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

"Dalam acara ini panitia pelaksana memberlakukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat dengan menyediakan masker, pelindung wajah, hand sanitizer, dan sarung tangan," jelas Ojak.

Disisi lain, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengakui, melalui digitalisasi, pasar bisa menjadi potensi penambah pendapatan pedagang karena mereka bisa menjangkau dan memasarkan dengan cara daring, tanpa

batas, dan membuka akses yang dahulu hanya bisa diakses di tempat bernama pasar saja. Sementara, dari sisi pembeli tidak harus pergi ke pasar secara rutin untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena bisa membeli lewat digital.

Digitalisasi, menjadi salah satu inovasi dan prioritas Kemendag agar sektor perdagangan tetap bergairah. Kemendag mendukung terciptanya digitalisasi pasar rakyat guna menjawab kebutuhan masyarakat di era ini, terlebih setelah adanya pandemi Covid-19.

Digitalisasi pasar ini juga sesuai dengan pola-pola perdagangan baru sebagai dampak pandemi Covid-19. Di antaranya, terjadi peningkatan perdagangan daring, penggunaan kurir daring, peningkatan penggunaan cara pembayaran non-tunai, dan penurunan mobilitas dan aktivitas sosial di ruang publik.

Untuk itu, perlu disadari bahwa keberlangsungan ekonomi, bisnis, produksi, distribusi, logistik, dan promosi tak lepas dari dukungan inovasi dan peran

teknologi.

"Digitalisasi pasar langkah komprehensif yang bermanfaat luas bagi seluruh pihak. Kemendag akan menjadi pihak terdepan yang mewujudkan hal itu sehingga pasar semakin berfungsi sebagai penyokong perekonomian negara," tegas Jerry.

Lebih lanjut, menurut Jerry, digitalisasi pasar rakyat bertujuan mempermudah proses transaksi, meningkatkan layanan kepada konsumen, mengurangi risiko terjadinya kejahatan, dan memudahkan pendataan, terutama data omzet.

Sedangkan dalam kerangka besar, digitalisasi pasar adalah cara memoderkan pasar sehingga lebih efisien, efektif, dan memuaskan semua pemangku kepentingan.

Digitalisasi pasar akan mengoptimalkan kerja pasar, konsumen, para pengusaha dan pedagang, serta fungsi negara dalam bidang ekonomi.

Pasar rakyat merupakan unsur vital bagi perdagangan dan merupakan bagian aktivitas sehari-hari masyarakat. @iwan/gro

**PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta  
(Perseroan)

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Nusantara Almazia Tbk ("Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut :

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2020  
Tempat : Gedung Ribens Lantai 2, Jl. RS Fatmawati No. 188 Jakarta 12420  
Waktu : 09:38 s/d 09:46 WIB

**I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

**A. Mata Acara Rapat**  
Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir Rapat**  
**Dewan Komisaris:**  
• Arman : Komisaris Independen  
**Direksi:**  
• Novrizal Setyawan : Direktur Utama  
• Nur Anisa Nusugi : Direktur

**C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang sah yang Hadir pada saat Rapat**  
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 1.735.983.702 saham atau merupakan 79,00% dari total 2.197.540.705 Perseroan.

**D. Pemberian Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**  
Pada Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

**E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat**  
• Pada Mata Acara Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**  
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

**G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat**

MATA ACARA	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
Mata Acara ke - 1	1.735.983.702 Suara atau 100%	Tidak Ada	Tidak Ada

**H. Keputusan Rapat**  
**Mata Acara Rapat 1**  
1. Menerima pengunduran diri dari Bapak Ikhwan Kamandanu selaku Direktur Perseroan melalui suratnya tertanggal 4 Agustus 2020;  
2. Mengangkat Caesarika Dwi Sekar Palupi selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditugaskan Rapat ini, dengan tetap mengiklusi sisa masa jabatan Direktur sebelumnya. Sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :  
**DIREKSI PERSEROAN**  
Direktur Utama : Novrizal Setyawan  
Direktur : Nur Anisa Nusugi  
Direktur : Caesarika Dwi Sekar Palupi  
**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**  
Komisaris Utama : Venjie Rahardjo Soedigno  
Komisaris Independen : Arman  
Komisaris : Michella Ristiadewi

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon persetujuan serta mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang.

Karawang, 26 Oktober 2020  
**PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk**  
Direksi Perseroan